

Strategi Komunikasi Politik Nahdlatul Wathan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dan 2018

Political Communication Strategies of Nahdlatul Wathan in the Regional Head Election during the General Election for Governor of West Nusa Tenggara in 2013 and 2018

Dewi Ummi Raihanun

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
E-mail: dewiummi111@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the political communication strategies of Nahdlatul Wathan (NW) in winning the regional head election during the general election for governor of NTB in 2013 and 2018. To answer this problem, an analysis was conducted on the main research questions, namely: What kind of Political Communication Strategies does NW use. The theory used in this study is the symbolic interaction theory. Data collection was conducted through direct observation, in-depth interviews, and literature study. The results showed that the political communication strategies used by NW in achieving victory were related to its interaction with the community, especially the NW community, through the utilization of the education sector and NW Tuan Guru figures who spread their dakwah to various places by incorporating political messages in their dakwah and relying on their authority as respected religious figures in the community.

Keywords: *Political Communication; General Election for Governor; Nahdlatul Wathan.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik Nahdlatul Wathan (NW) dalam memenangkan pemilihan kepala daerah pada pemilihan umum gubernur NTB tahun 2013 dan 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan analisis terhadap pokok pertanyaan penelitian, yaitu: Strategi Komunikasi Politik seperti apa yang NW gunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksi simbolik. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang NW gunakan dalam meraih kemenangan kaitannya dengan interaksinya bersama masyarakat khususnya masyarakat NW yaitu melalui pemanfaatan bidang pendidikan dan tokoh-tokoh Tuan Guru NW yang menyebarkan dakwahnya ke berbagai tempat dengan memasukkan pesan-pesan politik dalam dakwahnya dan mengandalkan otoritasnya sebagai tokoh agama yang disegani masyarakat.

Kata kunci: Komunikasi Politik; Pemilihan Umum Gubernur; Nahdlatul Wathan.

PENDAHULUAN

Organisasi Nahdlatul Wathan (NW) merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan masyarakat yang didirikan oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid atau yang akrab disapa Maulana Syaikh dan dideklarasikan di Pancor Lombok Timur NTB pada tanggal 1 Maret 1953. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi sosial pertama dan terbesar di Nusa Tenggara Barat tentu memberi banyak kontribusi dalam masyarakat sejak awal berdirinya. NW berkiprah dalam bidang pendidikan, dakwah keagamaan, dan sosial (Sofyan et al., 2020). Selain terfokus pada beberapa kegiatan kontribusi tersebut NW juga telah mencetak banyak kader-kader aktivis yang berkiprah pada dunia politik.

TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid adalah seorang ulama besar sekaligus seorang politikus. Hubungan antara agama dan politik menjadi penting bagi beliau, hal ini menjadi pemicu semangat Maulana Syaikh dalam melaksanakan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok (Amri & Ansori, 2019).

Sebagai seorang ulama besar yang disegani dan sekaligus pendiri Nahdlatul Wathan keputusan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid untuk terjun dalam dunia politik sangat berpengaruh bagi masyarakat NTB, hingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana masyarakat NTB semakin mapan melakukan perubahan ke arah perpolitikan. Berangkat dari hal inilah ditegaskan kembali perpolitikan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid menjadi landasan awal guna melihat bagaimana paradigma sosio-politik pada masyarakat NTB terutama bagi masyarakat NW (Fahrurrozi, 2017). Banyaknya masyarakat yang berafiliasi bersama NW sehingga mereka mendapat sebutan *Nahdliyin* dan *Nahdliyat*.

Nahdlatul Wathan mulai terjun dalam dunia politik pada tahun 1950 oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid sejak ia ditetapkan menjadi Konsultan Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil (Fahrurrozi, 2017). Karir politik Nahdlatul Wathan semakin meluas bersamaan dengan pergerakan NW dalam membentuk relasi dengan banyak partai politik, mulai dari partai Masyumi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada masa orde baru (Abdurrahman, 2014)

Munculnya banyak tantangan di Nahdlatul Wathan dipengaruhi oleh gejolak politik yang terjadi di negeri ini. Menghadapi pemilu legislatif, pengunduran diri beberapa pimpinan Nahdlatul Wathan terjadi di tingkat eksekutif, regional, dan manajemen daerah. Namun kasus ini masih dapat ditangani dengan baik oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid dengan mengadakan konferensi kilat pada tanggal 31 Januari 1977 (Abdurrahman, 2014).

Tidak hanya itu, terjadi kembali konflik dalam tubuh Nahdlatul Wathan yang mengakibatkan banyak dari kader-kader NW yang menentang pemerintah pendiri NW. Dimulai saat Tuan Guru Zainuddin mengambil politik diam atau dengan istilah Gerakan Tutup Mulut (GTM) pada pemilihan umum tahun 1982, artinya masyarakat Nahdlatul Wathan khususnya Lombok Timur tidak lagi disuruh untuk

memilih Golkar dalam pemilu tersebut. Pada mulanya Golkar dipilih sebagai haluan untuk berafiliasi oleh NW dikarenakan terdapat pertimbangan politik bahwa Golkar adalah partai Orde Baru yang dinilai sukses menumpas G 30/S PKI. NW beranggapan bahwa hal ini dapat memberi kemaslahatan bagi kaum muslimin mengingat NW masuk dalam dunia politik dengan tujuan untuk memberi kemaslahatan pada masyarakat. Namun pada pemilu berikutnya, NW memilih Golkar setelah kontrak politik dengan elit Golkar dan berbagi lebih banyak di parlemen sehingga Golkar tidak lagi menerima keberpihakan politik dari komunitas NW. (Fahrurrozi, 2017).

Kemudian gejolak dari dalam tubuh keluarga besar TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid, masyarakat dan para Tuan Guru juga terjadi pasca meninggalnya TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1997. Masyarakat dan kader-kader NW memilih jalan yang berbeda-beda, ada yang tetap bersama Golkar dan ada juga yang berafiliasi ke partai-partai baru yang dibentuk pasca Orde Baru atau reformasi. Konflik dikalangan keluarga terjadi akibat perebutan kekuasaan diantara kedua putri TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid yaitu Sitti Rahun Zainuddin Abdul Madjid (putri sulung) dan Sitti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid (putri bungsu) yang dimana kedua putrinya tersebut sama-sama memiliki hak sebagai penerus Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) (Fahrurrozi, 2017).

Kini Nahdlatul Wathan terbagi menjadi dua bagian. Perpecahan yang terjadi ini sangat berpengaruh kepada sikap politik masyarakat Islam di Lombok Timur. Sikap politik masyarakat dapat dilihat dari aspek keberpihakan mereka kepada kedua kubu NW ini. Sehingga masing-masing kubu berjuang dan bekerja ekstra keras untuk memperoleh dukungan dari masing-masing masyarakat yang notabene pengikut NW (Fahrurrozi, 2019).

Adapun NW dari pihak Pancor diketuai oleh Sitti Rahun Zainuddin Abdul Madjid yang partai politiknya berafiliasi pada Partai Bulan Bintang (PBB) dan mengutus putranya TGH. Zainul Majdi, MA menjadi anggota DPR RI. Sementara itu untuk NW Anjani diketuai oleh Sitti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid dan berafiliasi pada partai Bintang Reformasi (PBR) dan mengutus putranya Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE menjadi anggota DPR RI dan keluarga besar NW Anjani, menjadi anggota Dewan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di NTB. Seiring berjalannya waktu, kedua kubu ini terus menunjukkan perubahan dalam penetapan afiliasi partai politiknya masing-masing hingga berdampak pada masyarakat pengikut organisasi NW. berlanjut pada pemilu tahun 2009 kubu Sitti Rahun Zainuddin Abdul Madjid berafiliasi ke partai Demokrat yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan hadir sebagai pemenang. Sedangkan disisi lain Sitti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid berafiliasi pada partai politik PBR dan dapat mengantarkan kader-kader NW sampai tingkat DPRD sedangkan untuk tingkat Pusat dengan Calon Lalu Gede Syamsul Mujahidin Memperoleh suara yang sangat signifikan (Fahrurrozi, 2017).

Berlanjut pada pemilihan Umum legislatif tahun 2014 Sitti Rahun tetap pada Demokrat dan keputusan pemilihan presiden ke pasangan Prabowo-Hatta.

Dan Sitti Raehanun beralih ke partai Hanura dan Partai PKB dan memutuskan untuk memilih presiden Jokowi-Jusuf Kalla (Fahrurrozi, 2017). Kemudian pada pemilihan umum presiden tahun 2019 dari kubu Anjani milik Sitti Raihanun mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan beberapa faktor salah satunya yang diungkapkan oleh TGH Lalu Gede Muhammad Wirasakti Sakti sebagai Ketua Dewan Mustasyar PBNW bahwa Jokowi adalah satu-satunya Presiden yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid (Yan, 2018). Selain itu Lalu Gede Sakti juga dalam tautan liputan6.com mengatakan akan mendeklarasikan kembali Jokowi pada saat perhelatan ulang tahun NWDI. NW Anjani juga berharap masyarakat NTB, khususnya jamaah NW, untuk tetap kompak dan bersatu memenangkan Jokowi sekaligus mendukung penuh pasangan Calon Gubernur Ali bin Dahlan dan TGKH Lalu Gede Wiresakti yang mewakili kubu Raihanun pada pilkada 27 Juni 2018 (Bahanan, 2018).

Kembali pada history kemenangan NW, pada pilkada Gubernur tahun 2008 di NTB, NW dari kubu Pancor yaitu Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid mengusung anaknya TGH. Zainul Majdi dengan menggandeng PKS sebagai koalisi dengan PBB yang berhasil meraih kemenangan dalam pertarungan ini hingga menuntaskan 2 periode dalam jabatannya. Tidak cukup sampai disana, pada perhelatan pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 kedua kubu NW yaitu Pancor dan Anjani sama-sama mengusung kandidat masing-masing, dari kubu pancor mengusung Sitti Rohmi Djalilah, sebagai wakil Gubernur NTB periode 2018-2023. Sitti Rohmi Djalilah merupakan kakak perempuan dari Gubernur sebelumnya TGH. Zainul Majdi dengan menggandeng Partai Demokrat dan Nasdem. Kemudian dari kubu Anjani juga mengusung TGKH Gede Wiresakti yang merupakan anak pertama dari Sitti Raehanun melalui jalur independen. Sayangnya pada perhelatan pilkada 2018 ini TGKH Gede Wiresakti dari kubu Anjani harus menerima kekalahan. Dan kemenangan berhasil diraih oleh kubu Pancor dengan dilantiknya Sitti Rohmi Djalilah, sebagai wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Kemenangan-kemenangan NW dalam pesta Pemilu ini kemudian mendorong penulis untuk meneliti bagaimana strategi yang digunakan oleh NW kaitannya dengan masyarakat dalam memperoleh suara dan dukungan terhadap afiliasi partai politik mereka dan tokoh yang mereka usung. Sebenarnya telah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang telah menulis dan menemukan strategi-strategi politik yang NW gunakan dalam memenangkan pemilu salah satunya adalah penelitian milik Sofyan et al. (2020) dengan judul "*Strategi Komunikasi Politik Ulama Nahdlatul Wathan Pancor Dalam Membentuk Opini Publik Pilkada Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*". Penelitian ini mengandalkan teori agenda setting untuk menemukan hasil penelitiannya, bahwa dalam membentuk opini publik strategi komunikasi politik yang dilakukan ulama NW Pancor adalah dengan menyelenggarakan berbagai agenda-agenda politik. Perbedaannya dengan penelitian ini, bahwa penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik dalam

menjawab pertanyaannya dengan fokus penelitian pada strategi komunikasi politik melalui pendidikan dan Tuan Guru NW.

Perlu penulis ingatkan kembali bahwa penelitian ini tidak dipengaruhi oleh perpecahan dan dualisme kepemimpinan yang terjadi pada tubuh Ormas Islam Nahdlatul Wathan. Penelitian ini tidak terfokus pada salah satu kubu saja, namun berkiblat pada kemenangan yang NW raih dalam perhelatan politik yang mereka alami sehingga penulis merasa tidak perlu untuk menunjukkan keberpihakan dalam objek penelitian ini.

Untuk memahami teori interaksi simbolik penulis mengacu pada beberapa ahli seperti Herbert Blummer yang berpendapat bahwa interaksi simbolik adalah sebuah proses interaksi yang menciptakan arti atau makna bagi setiap individu. Lalu ada Scott Plunkett juga yang mendefinisikan interaksi simbolik sebagai cara belajar untuk menafsirkan dan memberikan makna atau arti terhadap dunia melalui interaksi yang kita lakukan dengan orang lain (Aidi & Hasrinda, 2018).

George Hebert, mengkaji teori interaksi simbolik, dan telah menunjukkan bahwa bahasa secara inheren merupakan sistem simbol dan kata-kata adalah simbol karena dapat memberi makna pada banyak hal. Atau dapat juga dijelaskan bahwa simbol atau teks merupakan representasi dari pesan yang dikomunikasikan kepada publik (Aidi & Hasrinda, 2018).

Komunikasi yang terjadi dalam tatanan interpersonal secara tatap muka dan timbal balik antar individu disebut interaksi simbolik. Dijelaskan bahwa interaksi simbolik ada baik dari segi komunikasi maupun sosiologi dan bersifat interdisipliner. Demikian pula halnya dengan objek material (*objectum material*) yaitu manusia, dan perilaku manusia (*human behavior*). Interaksi merupakan istilah dan garapan dari sosiologi, sedangkan simbolik merupakan garapan dari komunikologi atau ilmu komunikasi. Simbol merupakan objek sosial dalam interaksi yang digunakan untuk mewakilkan dan komunikasi yang ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Kemudian mereka akan memberi makna atau arti, menciptakan dan mengubah objek dalam interaksi. Simbol sosial dapat muncul dalam bentuk objek fisik (benda tak terlihat), kata-kata (mewakili objek fisik, perasaan, ide dan nilai) dan tindakan (yang dilakukan orang untuk menciptakan rasa komunikasi dengan orang lain) (Dadi, 1998).

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengupas strategi politik NW menggunakan teori interaksi simbolik yang penulis temukan dalam interaksi NW dengan masyarakat dalam mencapai tujuannya yaitu untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat memilih kader-kader atau tokoh politik yang mereka usung. Penelitian ini berkedudukan bukan sebagai penelitian baru namun penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan menambah penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis jabarkan di atas.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengumpulan data kemudian dilakukan dengan observasi secara langsung dengan cara penulis mengikuti kajian keagamaan NW, wawancara mendalam dengan tokoh ulama NW dan anggota NW, dan studi pustaka guna mendapat dan mengumpulkan data-data sekunder dari dokumen terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perjuangan politik NW tentu saja tak luput dari peran pemanfaatan dunia pendidikan dan Tuan Guru sebagai tokoh yang disegani masyarakat. Penulis melihat di Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lombok sebagian besar masyarakatnya terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Wathan. Hampir di setiap wilayah di Nusa Tenggara Barat terdapat kader-kader NW yang mendirikan pondok pesantren maupun lembaga-lembaga keagamaan untuk meneruskan dan menjaga identitas Nahdlatul Wathan. Tak heran, mengapa Nahdlatul Wathan tumbuh dan mampu bertahan bahkan semakin meluas hampir ke seluruh wilayah di Indonesia jika bukan karena NW memiliki strategi tersendiri yang penulis akui sangat efektif dan berhasil dalam memperluas jangkauan organisasinya.

Nahdlatul Wathan memiliki keinginan yang besar dalam mengembangkan dakwahnya, tentu saja bukan hanya di sekitar NTB saja namun hingga keluar NTB. NW menganggap bahwa berpartisipasi dalam politik sangat penting, karena sebagai pemimpin yang mewakili umat, ia dapat dipercaya untuk berpartisipasi dalam struktur pemerintahan untuk membangun masyarakat politik yang beradab dan adil. Oleh karena itu, politik tidak dapat dilihat hanya sebagai gerakan Nahdlatul Wathan, tetapi sebagai alat dakwah. Karena pergerakan dan pertumbuhan Nahdlatul Wathan hanya akan berdiri di pusatnya dan tidak akan berkembang jika tidak menggunakan politik sebagai alat dakwah.

Saipul dalam tulisannya mengatakan bahwa TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid mampu mengintegrasikan banyak pendekatan termasuk seni, budaya, pendidikan dan politik dalam dakwahnya. Keterampilan dan potensi yang beliau miliki juga bisa dimanfaatkan dengan baik. TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid juga dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca oportunistik. Ketika para tokoh agama lain sibuk dengan dunia pesantren, TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid justru meninggalkan pesantren dan membangun madrasah, beliau memahami bahwa madrasah jauh lebih efektif, modern, sistematis dan produknya mampu bersaing di pasar kerja. Selain itu, madrasah menjadi lembaga pendidikan alternatif juga disetujui oleh pemerintah. Nama TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid semakin dikenal di seluruh penjuru pulau Lombok karena gerakannya dalam membangun madrasah dan sebagian besar madrasah-madrasah tersebut menggunakan atau menyematkan kata NW untuk nama akhir madrasah tersebut (Hamdi, 2018).

Penulis juga mengakui keberhasilan NW dalam dunia pendidikan ini, setiap NW mengeluarkan output dalam bentuk alumni maka alumni tersebut ketika memiliki pondok pesantren, madrasah atau lembaga pendidikan lainnya harus menyematkan nama NW di akhir nama lembaga mereka. Dengan begitu tali yang menghubungkan NW satu dengan yang lainnya akan terus menyambung dan semakin meluas. Ketika sebuah lembaga pendidikan yang menyemat nama NW maka jika terjadi penurunan kualitas atau kegagalan operasional maka NW tersebut akan langsung diambil alih dan difungsikan kembali oleh NW pusat, sehingga semua bentuk kebutuhan operasional akan menjadi tanggungan NW pusat. Dengan cara itulah NW akan terus berdiri kuat ditengah masyarakat.

Nahdlatul Wathan mengembangkan lembaga pendidikan miliknya sejak 1943 hingga 1997, NW berhasil menciptakan 800 buah lembaga pendidikan, dan yang lebih menarik lagi lembaga pendidikan yang berada dibawah otoritasnya merentang dari tingkat taman kanak-kanak sampai menengah atas, dan perguruan tinggi (Oktara, 2015).

Praktik dakwah yang NW terapkan bukan hanya melalui pendidikan formal saja, namun juga melalui ceramah-ceramah umum (pengajian) yang dilakukan secara terus menerus dan bergantian dari satu tempat ketempat lainnya, dari kampung ke kampung yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar. Simbol-simbol dalam bentuk legenda lokal yang digunakan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid seperti pembacaan wasiat, penjualan aksesoris Nahdlatul Wathan berupa foto, kalung dan cincin yang didalamnya terdapat foto TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid baik dalam teks NW maupun ceramah-ceramahnya memiliki pengaruh baik dalam tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat (Hamdi, 2018).

Sepeninggal TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid metode ini terus dilakukan oleh penerus-penerus beliau. NW telah banyak melahirkan tuan guru-tuan guru yang mampu untuk melakukan dakwah dengan sangat baik tentunya dengan tidak pernah melepaskan NW dalam nilai-nilai dakwahnya. Pentingnya peran tuan guru dalam menyebarkan dakwah dan sekaligus menjadi media penyampai NW ke berbagai tempat menjadi hal penting bagi penulis bahwa NW akan terus memanfaatkan peran tuan guru dalam menjalankan tujuannya terutama tujuan politiknya.

Berkembangnya lembaga pendidikan milik NW menjadi penyebab besarnya pengaruh tuan guru dalam kehidupan masyarakat NTB. Lembaga pendidikan yang tersebar di NTB melahirkan ribuan ulama yang kemudian ulama-ulama ini membangun pesantren-pesantrennya sendiri. TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1934 M. bernama Darul Mujahidin. Namun pada tahun 1942 pesantren tersebut dibubarkan oleh penjajah Jepang secara formal, akan tetapi TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid dalam aplikasi penerapan pengajaran tetap dilaksanakan. Sehingga pada 15 Jumadil Akhir 1356 H TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid mendirikan madrasah yang bernama Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) khusus untuk putra dan pada 15 Rabiul Akhir 1364 kembali mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Islamiyah

(NBDI) untuk putri. Kedua madrasah inilah yang menggunakan pengajaran sistem klasikal pertama di daerah Lombok NTB (Nu'man & Asy'ari, 1998). Dari kedua madrasah inilah sebagai embrio berdirinya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) sebagai organisasi masyarakat terbesar di NTB, sejak itulah NW memiliki cabang di seluruh daerah Lombok kemudian didirikanlah pesantren Darunnahdlatain NW Pancor sebagai pusat koordinasi pendidikan di lingkungan organisasi. Dari tahun ke tahun secara periodisasi TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid memberikan peranan penting dalam mencetak tokoh-tokoh pendiri pondok pesantren di Lombok NTB kepada murid-muridnya dari angkatan pertama NWDI yang dimulai dari pendirian beberapa pondok pesantren di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara. Berdirinya banyak pondok pesantren dari murid-murid TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid inilah pada tahun-tahun berikutnya para tokoh tuan guru di masing-masing daerah termotivasi untuk mendirikan madrasah sistem klasikal (Dahlan, 2016).

Disebutkan kembali oleh Fahrurrozi dalam wawancara bahwa NW telah berhasil mendirikan 750 madrasah oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid semasa hidupnya. Kemudian Ummuna Sitti Raehanun Zainuddin Abdul Madjid berhasil mendirikan sekitar 1.600-1.700 lembaga pendidikan sampai berakhir masa jabatannya sebagai pemimpin PBNW selepas ayahandanya.

Penulis melihat dalam mencapai tujuan politiknya NW memanfaatkan dua media ini yaitu peran lembaga pendidikan dan peran Tuan Guru. Nahdlatul Wathan memiliki doktrin "*sami'na wa atha'na*" (dengar dan kerjakan) yang di gaungkan semenjak masa TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid dan terus diamalkan serta diterapkan dengan sepenuh hati oleh masyarakat nahdiyyin. Penulis melihat hal ini juga menjadi nilai kuat dalam mensukseskan strategi politik yang NW gunakan. Ada dua strategi politik yang penulis temukan dalam penelitian ini. Yang pertama, strategi komunikasi politik melalui pemanfaatan lembaga pendidikan dan peran Tuan Guru.

Strategi Komunikasi Politik melalui Pendidikan

Bidang pendidikan adalah kegiatan organisasi Nahdlatul Wathan yang paling menonjol. Selama hayat Maulana Syeikh, perkembangan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan berkembang pesat, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kemudian di masa kepemimpinan Sitti Raehanun, pengembangan lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan terus diupayakan (Mugni, 2013).

Nahdlatul Wathan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam telah memberikan andil kepada agama, nusa, dan bangsa. Perkembangan Nahdlatul Wathan dalam bidang pendidikan dan peran sertanya membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan serta hajat masyarakat yang semakin besar dalam bidang pendidikan, tampaknya merupakan salah satu pendorong bagi Nahdlatul Wathan untuk terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan diri dalam mengelola pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren,

madrasah dan sekolah di lingkungan Nahdlatul Wathan terus mengalami peningkatan, baik jumlah dan jenis sekolah/madrasah, tingkat atau jenjang pendidikannya, maupun kurikulum yang digunakan, terutama yang berada di kompleks NWDI dan NBDI (Mugni, 2013).

Masifnya pergerakan NW dalam dunia pendidikan menjadi sarana empuk dalam mencapai tujuan politiknya. Salah seorang anggota Nahdlatul Wathan yang penulis wawancarai mengakui bahwa dalam dunia pendidikan ketika masa pemilu maka mereka akan dikumpulkan di masjid atau tempat luas lainnya untuk diberikan arahan oleh pimpinan bahwa mereka harus memilih calon kandidat yang NW usung.

Berdasarkan teori interaksi simbolik penulis menemukan adanya simbol yang digunakan oleh pimpinan NW dalam menyampaikan pesan politiknya. Nahdlatul Wathan menggunakan simbol “*sami’na wa atha’na*” (dengar dan kerjakan) yang digunakan dalam menyampaikan isi pesannya kepada penerima. Ketaatan yang telah mengakar kuat dalam diri setiap individu kepada pimpinan dan guru-guru besar lainnya menjadi pondasi utama dalam menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan bagi anggota nahdliyyin. Tentu saja, sebagai penerima pesan anggota nahdliyyin dapat menangkap makna yang tersirat dari simbol tersebut. Penulis menemukan besarnya ketaatan, kepatuhan, serta kesediaan yang ditunjukkan oleh masyarakat nahdhiyyin untuk menerima dan menjalankan instruksi yang pimpinan sampaikan.

Peluang untuk menyampaikan pesan politik dalam dunia pendidikan akan menjadi sarana efektif mengingat NW telah memiliki banyak lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam pilkada pemilihan umum Gubernur masa jabatan 2013-2018 NW mengusung TGH. Zainul Majdi, MA yang berasal dari kubu Sitti Rauhun yang merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Wathan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid di Pancor dan memenangkan pilkada ini. Sebenarnya TGH. Zainul Majdi, MA telah menjabat menjadi Gubernur NTB dua periode lamanya sejak tahun 2008-2018. Kemudian dilanjutkan kembali oleh kakak perempuan TGH. Zainul Majdi, MA yaitu Sitti Rohmi Djalilah, yang berhasil memenangkan pilkada dan menjabat sebagai wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023. Tak heran, jika NW terus mendapat posisi baik dalam kursi pemerintahan karena NW memiliki strategi yang sangat kuat dalam mengumpulkan dan mempertahankan suara dari masyarakat NTB, terutama dengan memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan milik NW yang telah tersebar luas di berbagai tempat sampai ke pelosok-pelosok daerah di Nusa Tenggara Barat.

Sikap “*sami’na wa atha’na*” (dengar dan kerjakan) yang menjadi alasan utama untuk patuh pada kehendak pimpinan dalam menetapkan pilihannya. Jadi setiap lembaga pendidikan NW yang tersebar maka masing-masing pimpinannya akan menyampaikan kepada setiap murid-muridnya bahkan masyarakat

disekitarnya untuk mengikuti dan menaati apa yang telah pimpinan pusat NW tetapkan dalam pilkada-pilkada pemilihan umum pemilu Gubernur NTB.

Lembaga pendidikan yang telah berdiri terutama yang berada dibawah otoritas NW memiliki jangka operasional yang akan terus aktif bahkan semakin berkembang, bisa dikatakan bahwa lembaga pendidikan hampir tidak memiliki batas waktu mengingat kembali bahwa NW pusat akan terus mengayomi lembaga-lembaga yang berada dibawah otoritasnya, merawatnya dan membuatnya terus aktif menjadi pusat penyebaran Nahdlatul Wathan. Jadi sangat relevan dengan kemenangan-kemenangan yang telah NW raih dalam pilkada gubernur belasan tahun terakhir ini.

Dalam artikel ini tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana persaingan yang terjadi diantara dua kubu dalam menjalankan strategi politiknya karena dari kedua kubu ini sama-sama memiliki afiliasi dalam dunia pendidikan. Penulis hanya terfokus pada bagaimana strategi yang mungkin terjadi diantara kedua kubu ini secara universal dan tidak mengkaji secara khusus salah satu kubu.

Strategi Komunikasi Politik Melalui Peran Tuan Guru

Ulama atau Tuan Guru adalah salah satu entitas yang memiliki pengaruh besar pada tataran sosial politik Indonesia. Khususnya para ulama yang bertumpu pada lembaga yang berbasis pendidikan (Islam) atau dengan kata lain pesantren yang menempatkan posisi ulama, khususnya di Nusa Tenggara Barat disebut Tuan Guru. Tuan Guru hadir sebagai petron dengan bekal keilmuan pada bidang keagamaan yang mumpuni (Oktara, 2015).

Nahdlatul Wathan memberikan beberapa kriteria umum bagi mereka yang layak disebut sebagai Tuan Guru; pertama, penguasaan ilmu agama. Kedua, rahmat-Nya. Ketiga, menguasai kitab kuning seperti pendapat dari Fahrurrozi (2019) bahwa seseorang disebut tuan guru bila memenuhi syarat mampu menguasai 40 sampai 70 kitab. Keempat, memiliki perilaku yang baik di kalangan pendengar kaum muslimin serta aktif dalam sosial kemasyarakatan (Mawalidin, 2021).

Di masyarakat etnis Sasak, Tuan Guru merupakan salah satu figur elite yang mempunyai kedudukan terhormat dan menjadi panutan masyarakat. Dengan kualifikasi sebagai kelompok yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam, mereka diakui sebagai penyebar dan pemelihara ajaran Islam, khususnya dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (Fahrurrozi, 2019).

Inilah yang kemudian menjadi strategi keberhasilan politik NW di NTB. Kesuksesan keluarga besar Elit NW tidak terlepas dari kehadiran Tuan Guru di tengah masyarakat. Tuan Guru sebagai orang yang menjalankan fungsi kepemimpinan agama atau mengarahkan dan mengawasi para pemeluk agama, sehingga tuan guru tidak hanya mengambil tempat dalam urusan agama yang sakral seperti kepercayaan, ritual, peribadatan, persembahan dan sebagainya, namun juga dalam hal-hal yang bersifat keduniaan (Etzion & Halevy, 2008).

Bahkan Fealy (2003) dalam bukunya “Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama” memberi penekanan bahwa dalam dinamika sosial saat ini, keberadaan ulama tidak hanya dimaknai sebagai orang yang hanya memiliki ruang lingkup pada bidang keagamaan saja, namun sebagai seorang ulama mereka juga mengambil peran sebagai kontrol masyarakat, organisasi sosial, dan sebagai agen perubahan. Misi ulama kini mulai terjadi pergeseran dan menjadi lebih populer saat mereka memasuki bidang politik dengan mengambil posisi dalam kegiatan politik yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu maka ulama memiliki kemampuan hegemoni terhadap masyarakat melalui peran yang dimilikinya (Sofyan et al., 2020).

Adapun kaitannya dengan politik, *knowledge* yang dimiliki ulama merupakan *power* yang secara potensial dapat digunakan tidak hanya untuk mendalang dukungan umat secara keseluruhan untuk mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu, tetapi bahkan untuk mendukung suatu sistem politik atau kekuasaan politik tertentu. Dan tidak jarang bahkan tanpa *reserve*. Berkat aura sakral yang dimilikinya kehadiran ulama dalam suatu pertemuan politik, semacam kampanye pemilu, disertai himbuan ulama untuk mendukung partai atau kekuatan politik tertentu, apalagi ulamanya ikut menjadi kontestan dalam pemilu, maka hal ini bagi umat dapat dimaknai bukan hanya sekedar keputusan politik, tetapi sekaligus sebagai fatwa keagamaan (Fahrurrozi, 2019).

Berdirinya banyak pesantren yang terletak di wilayah perkampungan sehingga akan memungkinkan terjadi sebuah interaksi yang intens antara ulama, pesantren, dan masyarakat sekitar. Tentu saja ulama memegang peran ketokohan yang sentral dalam masyarakat yang berbasis Islam tradisional karena memiliki modal pengetahuan dan ulama sebagai entitas tertinggi di institusi pesantren (Oktara, 2015).

Meminjam istilah Peter L. berger, posisi jaringan Tuan Guru ini merupakan bagian dari “langit suci” (*sacred canopy*) yang berfungsi memediasi beberapa unsur kepentingan dunia profan (*world of profane*) yang melahirkan keselamatan, dan selalu menjadi orientasi masyarakat dalam kesehariannya. Dari situ tuan guru mengalami fungsi yang meluas dari sosial keagamaan hingga ke ranah politik (Fahrurrozi, 2019).

Berkembangnya lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan secara massif yang menghasilkan banyak Tuan Guru dan pesantren memberi peluang besar bagi NW untuk mendapatkan strategi baru karena guru memiliki legitimasi kuat ditengah masyarakat maka akan sangat mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari dihati masyarakat.

Seringkali penulis dalam observasinya dilapangan mendapatkan Tuan Guru dari kalangan NW yang diundang ke beberapa tempat untuk melaksanakan dakwah, di akhir penyampaian ceramahnya tuan guru akan menyelipkan pesan-pesan politik kepada jamaahnya untuk memilih kandidat yang diusung oleh NW maupun partai politik yang NW dukung. Prinsip *sami'na wa atho'na* yang mengakar kuat dalam

diri setiap individu termasuk tuan guru yang berada dalam legitimasi NW akan mengikuti arahan dari pimpinan. Tuan guru-tuan guru yang tersebar di berbagai pelosok wilayah NTB akan menyebarkan instruksi dari pimpinan kepada jamaahnya.

Penulis melihat peran Tuan Guru sebagai simbol yang digunakan untuk terhubung dengan lebih mudah ke masyarakat. Sosok Tuan Guru menempati posisi sakral ditengah masyarakat, memiliki otoritas dan legitimasi yang baik. Masyarakat akan menangkap makna simbol ini sebagai rasa taat dan takut karena melihat kepada tokoh tuan guru. Proses interaksi simbolik terjadi dengan efektif karena Tuan guru hadir sebagai sebuah simbol dan masyarakat menerima kemudian mengartikan simbol tersebut dengan baik.

Abdurrazaq salah seorang Tuan Guru yang berkiprah di bawah naungan NW bersama pesantren miliknya mengakui bahwa prinsip taat pada pimpinan menjadi suatu keharusan. Karena jika berbeda pilihan maka memiliki resiko yang besar, seperti akan mendapat hujatan dari keluarga, organisasi dan masyarakat.

Pemanfaatan instrumen politik ketokohan seorang Tuan Guru menjadi alat yang telah digunakan oleh NW dalam melakukan mobilisasi massa di setiap kampanye politiknya di tengah masyarakat nahdliyin. Segala bentuk keputusan dari pengurus besar NW dalam memperjuangkan organisasi baik dari segi internal organisasi itu sendiri seperti bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, maupun dari segi eksternalnya seperti jalur politik dan lainnya diharapkan masyarakat nahdliyin dalam ketersediaan, ketaatan dan kepatuhannya untuk menerima dan menjalankan instruksi tersebut.

Bahkan Saipul Hamdi dalam penelitiannya berargumen bahwa NW memiliki kultur dan tradisi keagamaan yang bersifat sufistik, sehingga menuntut ketaatan secara total kepada guru (mursyid). Argument ini kemudian dikuatkan dengan penanaman karakter keislaman dan bentuk kepemimpinan oleh TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid kepada masyarakat nahdliyin. Walaupun telah menjadi alumni dalam setiap pendidikan yang Maulana Syeikh tempuh namun ia tetap menjalankan ketaatan dan menjalin hubungan yang kuat dengan guru-gurunya. Maulana Syeikh selalu melibatkan guru-gurunya untuk berkonsultasi dan mengundang mereka untuk turut mengisi dan mengajar pengajian bersama di lingkungan pesantrennya. Kemudian tradisi ini terus berkembang dalam komunitas NW, para santri dan murid harus taat kepada guru-gurunya termasuk para Tuan Guru. Di lingkungan NW terdapat hirarki diantara para Tuan Guru dan Maulana Syeikh memiliki tingkatan yang paling tinggi. Kemudian dibawahnya terdapat para tuan guru sebagai asisten yang memiliki tugas berbeda-beda (Hamdi, 2013). Para Tuan Guru inilah yang tersebar luas melanjutkan perjuangan Maulana Syeikh baik dalam organisasi maupun kemaslahatan umat pada umumnya. Bentuk cinta, kasih sayang dan kesetiaan masyarakat NW pada guru-gurunya menjadi pengaruh besar kuatnya pengaruh Tuan Guru di tengah masyarakat NW maupun masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan NW dalam pilkada Gubernur tahun 2013 dan 2018 di NTB adalah melalui pemanfaatan lembaga pendidikan dan peran tuan guru. Melalui lembaga pendidikan yang NW kembangkan dan telah tersebar luas memberi kemudahan bagi NW untuk menyebarkan dan menyampaikan tujuan politiknya pada masyarakat luas, berkat simbol ketaatan yang dipegang kuat oleh anggota masyarakat nahdhyyin maka apa yang telah menjadi ketetapan pengurus besar NW akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Peran Tuan Guru yang memiliki legitimasi kuat ditengah masyarakat juga menjadi strategi komunikasi politik yang kuat bagi NW. Tokoh tuan guru menjadi simbol kepatuhan dan ketaatan bagi masyarakat karena memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pada semua pihak yang terlibat membantu penulisan artikel ini, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

REFERENCES

- Abdurrahman, F. (2014). Dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam Pemilu Pasca Era Orde Baru sampai Pemilu 2014. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 3(2), 363–410.
- Aidi, H., & Hasrinda, A. (2018). Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi). *Jurnal Risalah*, 29(2), 16–18.
- Amri, C., & Ansori, Z. (2019). *Pemikiran Politik Islam Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid*. XI(1), 74–103.
- Bahanan, H. (2018, April). *Ormas NW Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019 Karena Peduli Bangun NTB*. Liputan6.Com.
- Dadi, A. (1998). Interaksionisme Simbolik. *Komunikasi Antar Budaya*, 9(2).
- Dahlan, F. (2016). *Dialektika Tradisi Keilmuan Dinamika Masyarakat (Potret Pesantren di Lombok Nusa Tenggara Barat)*. Institut Agama Islam Negeri Mataram (IAIN) Mataram.
- Etzion, E., & Halevy, E. E. (2008). *Social Change: Sources, Patterns and Consequences* (2nd ed.). Basic Books.
- Fahrurrozi. (2019). *Nahdlatul Wathan (Refleksi Keislaman, Kebangsaan dan Keummatan)* (Ishak Hariyanto & Maliki (eds.); 1st ed.). CV. Al-Haramain Lombok.
- Fahrurrozi, F. (2017). Diaspora Politik Keluarga Organisasi Nahdlatul Wathan pada Pemilu Legislatif 2014 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Afkaruna*:

Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(1).
<https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0068.82-109>

- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967*. LKis.
- Hamdi, S. (2013, September). Transformasi Agama Dan Politik Dalam Kepemimpinan TGB. *Lombok Post*.
- Hamdi, S. (2018). Integrasi Budaya, Pendidikan, dan Politik dalam Dakwah Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok: Kajian Biografi TGH. Zainuddin Abdul Madjid. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(2), 105–122. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2964>
- Mawalidin, J. (2021). *Peranan Tuan Guru , Ormas Islam Nahdlatul Wathan di Lombok Sebagai Wadah Ajaran Keagamaan dan Sosial (Islam)*. 5(2), 221–236.
- Mugni, M. (2013). *Ibu Rumah Tangga Getarkan Lombok (Biografi Ummuna Hj. Sitti Raihanun Abdul Madjid)* (A. H. Mawadah & M. N. Arifin (eds.); 1st ed.). CV Dunia Kata.
- Nu'man, A. H., & Ays'ari, S. (1998). *Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial, dan Dakwah* (1st ed.). Toko Buku Kita.
- Oktara, A. (2015). Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 73–82.
- Sofyan, M. A., Laksono, P., & Chabibi, M. (2020). Strategi Komunikasi Politik Ulama Nahdlatul Wathan Pancor Dalam Membentuk Opini Publik Pilkada Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. *Jurnal Al-Tsiqoh (Dakwah Dan Ekonomi)*, 5(2), 57–73.
- Yan. (2018, April). *NW Dukung Jokowi di Pilpres 2019*. Radar Lombok.